

Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Ditinjau Dari Teori Legitimasi dan Teori *Stakeholder*

Meirna Puspita Permatasari¹, Ni Luh Putri Setyastrini²

¹Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia

²Universitas Brawijaya Malang, Jl. MT. Haryono No. 165, Malang, 65145, Indonesia

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that influence the volunteerism of companies to disclose information related to corporate social responsibility. The factors that influence the disclosure of social responsibility in this study in terms of the theory of legitimacy and stakeholder theory. This research is a qualitative research with content analysis technique. The results of the research based on the review of legitimacy theory indicate that several factors that influence the disclosure of corporate social responsibility are company size, type of industry, media pressure and corporate environmental performance. These factors are found in both developed and developing countries. A subsequent review through stakeholder theory shows that the determinants of corporate social responsibility disclosure differ between developed and developing countries. The influence of values, norms, culture, and government regulations influences the characteristics of stakeholders more visible in developing countries. This research also shows that several factors of corporate social responsibility disclosure must be explained through non-specific theories such as profitability and leverage.

Keywords: *disclosure of corporate social responsibility, legitimacy theory, stakeholder theory*

PENDAHULUAN

Kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh beberapa perusahaan menjadi sebuah cerminan dari kurang adanya tanggung jawab sosial perusahaan. Beberapa contoh kasus yang terjadi di Indonesia yaitu kasus pencemaran oleh PT. Freeport Indonesia yang merusak habitat di sekitar penambangan dan PT Inti Indorayon Utama di Sumatera Utara karena dianggap telah membahayakan lingkungan dan sosial di daerah Porsea (Basalamah & Jermias, 2005). Beberapa negara lainnya juga mengalami kasus pencemaran serupa akibat dari aktivitas operasional perusahaan yang tidak bertanggung jawab. Salah satunya adalah pencemaran oleh *Shell* atas tumpahnya oli di kawasan Nigeria pada tahun 2013 (Harvey & Hirsch, 2013).

Pencemaran lingkungan oleh perusahaan tidak hanya disebabkan oleh industri manufaktur, tetapi juga perusahaan yang bergerak pada bidang industri pariwisata juga turut andil dalam meningkatkan pencemaran lingkungan. Penelitian yang dilakukan oleh Katircioglu (2014) di Turki menemukan bahwa peningkatan pariwisata internasional akan membawa dampak terhadap peningkatan transportasi, konsumsi, akomodasi dan manajemen atraksi pariwisata. Peningkatan pariwisata internasional tidak hanya dapat dipandang sebagai kontribusi terhadap pendapatan ekonomi, namun juga harus diperhatikan bahwa adanya konsumsi energi yang akan berdampak pada pencemaran lingkungan.

Pandangan ekstrim Friedman (1962) terkait dengan tanggung jawab perusahaan yang hanya sebatas maksimisasi keuntungan kini telah mengalami pergeseran. Tanggung jawab perusahaan saat ini menjadi lebih luas yaitu mencakup tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar operasional perusahaan (Deegan & Unerman, 2006). Pandangan terkait pergeseran tanggung jawab perusahaan juga didukung oleh Gaffikin (2008) yang menyatakan bahwa sifat perusahaan telah mengalami perubahan signifikan selama kurang lebih 200 tahun. Perubahan sifat perusahaan terkait dengan adanya tuntutan perusahaan untuk lebih mempedulikan kebutuhan masyarakat. Salah satu bentuk nyata dari perhatian perusahaan masyarakat adalah melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Tindakan tanggung jawab sosial perusahaan telah diwajibkan namun pelaporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan masih bersifat *voluntary* (sukarela) baik di Indonesia maupun negara lainnya (Basalamah & Jermias, 2005). Sehingga, penulis merasa perlu untuk mengetahui

faktor-faktor yang memengaruhi kesukarelaan perusahaan untuk mengungkapkan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan.

Deegan & Unerman (2006) menyatakan bahwa pengungkapan sukarela terkait informasi perusahaan dapat dijelaskan melalui *Positive Accounting Theory* berupa Hipotesis Bonus, Tingkat Hutang maupun Biaya Politik. Deegan & Unerman lebih lanjut menyatakan bahwa pelaporan sukarela perusahaan juga dapat dilakukan dengan pendekatan melalui perspektif lain yaitu *Legitimacy Theory*, *Stakeholder Theory* maupun *Institutional Theory*. Pendekatan melalui tiga teori ini dirasa perlu karena ketiga teori tersebut merupakan teori yang berbasis sistem, dimana perusahaan dipandang sebagai pihak yang berpengaruh terhadap dan dipengaruhi oleh lingkungan (Gray, Owen & Adams, 1996). Artikel ini menggunakan dua teori utama yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Deegan & Unerman (2006) menyatakan bahwa kedua teori tersebut dipengaruhi dan memengaruhi kelompok lain dalam masyarakat dalam kaitannya dengan operasional perusahaan.

Saat ini, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dilakukan oleh perusahaan besar dari negara maju, melainkan juga dilakukan di negara berkembang. Jamali dan Neville (2011) menyatakan bahwa sistem bisnis nasional di negara berkembang dapat menghasilkan perbedaan ekspresi pengungkapan tanggung jawab sosial. Perwujudan tanggung jawab sosial di negara berkembang umumnya bersifat kurang formal dan cenderung filantropis. Tinjauan lebih lanjut terhadap perbedaan pengungkapan tanggung jawab sosial di negara maju dan berkembang adalah adanya kemungkinan bahwa kerangka tanggung jawab sosial di negara maju tidak sepenuhnya diterapkan di negara berkembang (Blowfield dan Frynas, 2005).

Artikel ini menyajikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan melalui sudut pandang teori legitimasi dan teori *stakeholder* baik di negara maju dan berkembang. Perbandingan faktor-faktor pengungkapan di negara maju dan berkembang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif mengenai perbedaan di antara kedua kelompok tersebut. Penulis berharap artikel ini dapat berkontribusi baik secara teoretis maupun praktis terkait faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah yang terpublikasi. Jumlah artikel ilmiah yang dianalisis adalah sebanyak 38 judul penelitian empiris dengan tema *Corporate Social Disclosure (CSD)*. Artikel yang diperoleh terbagi ke dalam dua kategori yaitu artikel penelitian di negara maju (14 artikel) dan berkembang (24 artikel) pada tahun 1992 - 2018. Artikel ilmiah dipilih berdasarkan jenis teori yang diadopsi yaitu teori legitimasi, teori *stakeholder*, dan gabungan antara teori yang tidak dijelaskan secara spesifik (*non-specific theory*). Peneliti menggunakan teknik analisis konten untuk meninjau faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial berdasarkan hasil penelitian yang tercantum pada 38 artikel yang dianalisis.

Tabel 1. Total Artikel yang Dianalisis

Total artikel yang dikaji	38
Artikel empiris di negara maju	14
Artikel empiris di negara berkembang	24

Sumber: Data diolah, 2018

Bordens & Abbott (2005) menyebutkan bahwa analisis konten digunakan untuk menganalisis data berupa rekaman suara atau tulisan yang menjelaskan suatu peristiwa, *item*, atau perilaku spesifik. Pada penelitian ini, analisis konten tahap pertama dilakukan dengan cara mengelompokkan literatur yang ditelaah berdasarkan kategori negara maju (*developed*) dan negara berkembang (*developing*). Kriteria negara maju dan negara berkembang ditentukan berdasarkan golongan pendapatan negara menurut *World Bank* (2018). Predikat negara maju diatribusikan kepada negara dengan tingkat pendapatan per

kapita tinggi (*high-income countries*). Sementara, predikat negara berkembang diatribusikan kepada negara dengan tingkat pendapatan per kapita rendah dan menengah (*low and middle-income countries*).

Tahap kedua adalah telaah determinan yang menentukan praktik pengungkapan sosial perusahaan (CSD) di masing-masing kategori negara. Literatur yang telah terkumpul di bawah kategori jenis negara berdasarkan pendapatannya tersebut kemudian dianalisis untuk menemukan kesamaan dan perbedaan faktor-faktor yang memengaruhi praktik CSD. Selanjutnya, faktor-faktor tersebut ditinjau berdasarkan landasan teori yang digunakan yaitu teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Corporate Social Disclosure* (Csd) Pada Negara Maju

Penelitian tentang pengungkapan sosial perusahaan atau *corporate social disclosure* (CSD) sebagian besar dipelopori dilakukan di negara maju. Berdasarkan analisis konten, terdapat 24 negara maju baik di benua Amerika, Asia, Australia maupun Eropa yang telah diteliti secara empiris terkait faktor-faktor yang memengaruhi CSD. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSD pada negara maju ditinjau dari sudut pandang teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Teori Legitimasi

Corporate social disclosure merupakan pelaporan sukarela yang dilaksanakan oleh perusahaan. Terdapat beberapa faktor-faktor yang memengaruhi CSD pada negara maju berdasarkan analisis konten yang telah dilaksanakan. Jika ditinjau berdasarkan teori legitimasi, salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat CSD adalah ukuran perusahaan. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian empiris yang dilaksanakan pada beberapa negara maju seperti Amerika Serikat (Boesso & Kumar, 2007; Van der Laan Smith, Adhikari & Tondkar, 2005), Denmark (Andrikopoulos & Kriklani, 2012; Van der Laan Smith, *et al.*, 2005), Hongkong (Gao, Heravi & Xiao, 2005), Inggris (Brammer & Pavelin, 2006), Italia (Boesso & Kumar, 2007), Norwegia (Van der Laan Smith *et al.*, 2005), Qatar (Naser, Hussaini, Kwari-D & Nuseibeh, 2006), Selandia Baru (Hackston & Milne, 1996), Spanyol (Garcia-Ayuso & Larrinaga, 2003), Swedia (Tagesson, Blank, Broberg & Collin, 2009) serta Turki (Kilic, Kuzey & Uyar, 2015).

Faktor ukuran perusahaan merupakan faktor yang paling banyak dipertimbangkan dalam meneliti faktor-faktor yang mendorong CSD. Seluruh hasil penelitian empiris yang telah disebutkan menemukan bahwa semakin besar perusahaan maka perusahaan akan cenderung untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial perusahaan (CSD). Perusahaan dengan ukuran yang semakin besar cenderung memiliki visibilitas dan pengaruh ekonomi yang kuat (Andrikopoulos & Kriklani, 2012). Perusahaan dengan ukuran yang besar juga cenderung melaksanakan aktivitas yang dapat berdampak masyarakat maupun lingkungan, sehingga perusahaan akan dituntut untuk mengkomunikasikan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan agar tetap dapat dilegitimasi oleh masyarakat (Cowen, Ferreri & Parker 1987).

Faktor berikutnya dari sudut pandang teori legitimasi adalah jenis industri perusahaan. Beberapa penelitian empiris yang mendukung pernyataan tersebut dilakukan pada negara Amerika Serikat (Cho & Patten, 2007), Hong Kong (Gao *et al.*, 2005), Inggris (Brammer & Pavelin, 2006; Clarke & Gibson-Sweet, 1999), Jerman (Cornier, Magnan & Velthoven, 2011), Selandia Baru (Hackston & Milne, 1996), Spanyol (Garcia-Ayuso & Larrinaga, 2003) serta Swedia (Tagesson *et al.*, 2009). Perusahaan yang berada pada industri yang sensitif terhadap isu lingkungan (dikenal juga dengan istilah perusahaan *high-profile*) akan cenderung mengungkapkan CSD yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan pada industri lainnya. Perusahaan pada industri yang sensitif terhadap lingkungan cenderung akan meningkatkan CSD disebabkan karena adanya usaha untuk menjaga legitimasi dan reputasi perusahaan dari masalah yang timbul akibat aktivitas perusahaan yang membahayakan lingkungan (Clarke & Gibson-Sweet, 1999). Selain memengaruhi kuantitas CSD yang dihasilkan oleh perusahaan pada industri tertentu, jenis industri dimana perusahaan tersebut berada juga akan memengaruhi kecenderungan informasi yang akan disajikan dalam CSD (Gao *et al.*, 2005).

Teori legitimasi juga menyajikan pandangan bahwa CSD dipengaruhi oleh perhatian atau eksposur media. Faktor ini terbukti pada negara maju seperti Jerman (Cornier *et al.*, 2011) dan Spanyol

(Garcia-Ayuso & Larrinaga, 2003). Tekanan yang terungkap melalui media merupakan tekanan publik, sehingga ketika terdapat tekanan dari media maka perusahaan cenderung untuk meningkatkan CSD yang dihasilkan (Cornier *et al.*, 2011). Di sisi lain, media juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menampilkan aktivitas terkait lingkungan yang telah dilaksanakan perusahaan. Publikasi sedemikian rupa diperlukan untuk mencapai efektivitas dari tindakan tanggung jawab sosial perusahaan, dan sebagai bentuk tindakan untuk meyakinkan publik bahwa perusahaan telah melaksanakan “kontrak sosial” (Garcia-Ayuso & Larrinaga, 2003).

Faktor lainnya yang terkait dengan teori legitimasi adalah kinerja lingkungan perusahaan. Berdasarkan artikel yang telah dianalisis, faktor kinerja lingkungan hanya berpengaruh di negara Amerika Serikat (Cho & Patten, 2007). Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa semakin buruknya kinerja lingkungan perusahaan, maka perusahaan akan cenderung untuk meningkatkan CSD yang dihasilkan. CSD dipandang perlu bagi perusahaan untuk menampilkan komitmen jangka panjang perusahaan terkait dengan isu lingkungan sebagai bentuk legitimasi dan investor justru bereaksi positif atas komitmen dari perusahaan tersebut (Milne & Patten, 2002).

Teori Stakeholder

Tinjauan lain dalam menentukan faktor-faktor yang memengaruhi CSD adalah melalui teori *stakeholder*. Berdasarkan teori ini maka dapat dilihat bahwa strategi perusahaan (salah satunya adalah CSD) dilaksanakan untuk memenuhi harapan *stakeholder* secara umum (*ethical branch*) dan kelompok *stakeholder* tertentu (*managerial branch*) (Deegan & Unerman, 2006). Penelitian empiris yang dilakukan pada negara Amerika Serikat dan Italia (Boesso & Kumar, 2007) serta Denmark, Norwegia dan Amerika Serikat (Van der Laan Smith *et al.*, 2005) menunjukkan bahwa perusahaan berkomitmen untuk menyajikan informasi terkait lingkungan kepada *stakeholder*. Komunikasi informasi dirasa perlu untuk meningkatkan nilai internal dan eksternal perusahaan bagi *stakeholder* (Boesso & Kumar, 2007). Van der Laan Smith *et al.* (2005) menyatakan bahwa perusahaan juga akan cenderung meningkatkan CSD ketika *stakeholder* menaruh perhatian tinggi pada isu sosial dan lingkungan.

Berdasarkan artikel yang telah dianalisis, salah satu faktor yang memengaruhi CSD adalah ketersebaran kepemilikan saham. Hasil penelitian empiris tersebut terbukti pada negara Inggris (Brammer & Pavelin, 2006) dan Turki (Kilic *et al.*, 2015). Ketersebaran kepemilikan saham secara tidak langsung berdampak pada semakin meluasnya ekspektasi dan harapan pemegang saham, terutama dikaitkan dengan aktivitas tanggung jawab sosial perusahaan (Kilic *et al.*, 2015). Semakin tersebarnya kepemilikan saham menunjukkan bahwa semakin rendahnya otoritas pemegang saham terhadap manajer, sehingga ada kekhawatiran terciptanya asimetri informasi dan berakibat pada reaksi buruk investor. Sehingga, untuk mengurangi kekhawatiran tersebut maka perusahaan akan cenderung melaksanakan CSD sebagai bentuk komunikasi terhadap para pemegang saham (Brammer & Pavelin, 2006).

Faktor yang berpengaruh lainnya berdasarkan teori *stakeholder* adalah kepemilikan saham oleh pemerintah. Berdasarkan analisis artikel yang dilaksanakan, penelitian empiris ini hanya terbukti pada negara Swedia. Penelitian yang menggunakan faktor ini cukup jarang dilaksanakan terutama pada negara *Anglo-American* dimana tidak terdapat perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (Tagesson *et al.*, 2009). Penelitian ini menemukan hasil bahwa perusahaan dengan kepemilikan saham oleh pemerintah menyajikan CSD melebihi perusahaan swasta di Swedia. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tekanan dari pemilik (dalam hal ini negara) dan media masa terkait dengan kepatuhan yang harus dijalankan oleh perusahaan (Tagesson *et al.*, 2009).

Faktor Lain yang Menggunakan Non-Specific Theory

Faktor lainnya yang dicantumkan dalam bagian ini merupakan faktor yang ditinjau melalui lebih dari satu teori. Beberapa artikel yang telah dianalisis, tidak mencantumkan secara jelas induk teori yang digunakan dalam menjelaskan hubungan dengan CSD yang dihasilkan. Faktor-faktor tersebut adalah profitabilitas dan tingkat hutang (*leverage*).

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu indikator kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan pada negara Swedia (Tagesson, *et al.*, 2009) dan Amerika Serikat (Roberts, 1992) menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi cenderung untuk meningkatkan CSD yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Tagesson, *et al.* (2009) perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki sumber daya yang lebih memadai untuk melaksanakan pengungkapan terkait kinerja sosial dan lingkungan serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas keuntungan aktivitas operasional perusahaan.

Faktor berikutnya adalah tingkat hutang (*leverage*) yang diteliti secara empiris di negara Amerika Serikat (Roberts, 1992), Inggris (Brammer & Pavelin, 2006), serta Qatar (Naser *et al.*, 2006). Ketiga penelitian empiris ini memiliki hasil yang berbeda terkait cara pandang pengaruh hutang pada CSD yang dihasilkan perusahaan. Perusahaan di negara Amerika Serikat dan Qatar menemukan bahwa peningkatan hutang akan berdampak pada peningkatan CSD yang dihasilkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi ekspektasi *stakeholder* kreditor. Naser *et al.* (2006) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi akan kesulitan untuk memperoleh sumber pendanaan baru baik dari kreditor maupun pasar modal, sehingga untuk meyakinkan para investor maupun kreditor maka perusahaan akan menyajikan CSD secara detail.

Sementara itu penelitian di negara Inggris menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat hutang yang rendah cenderung akan menyajikan CSD yang lebih baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui pandangan bahwa ketika tingkat hutang perusahaan rendah, maka perusahaan tidak mendapat tekanan dari kreditor untuk mengoptimalkan kinerja ekonomi perusahaan terkait pemenuhan kewajiban pembayaran hutang. Perusahaan lebih dapat memfokuskan perhatian pada aktivitas organisasional seperti pelaporan sukarela yang secara tidak langsung menjadi cerminan keberhasilan perusahaan (Brammer & Pavelin, 2006).

Faktor-Faktor Yang Memengaruhi *Corporate Social Disclosure* (Csd) Pada Negara Berkembang

Penelitian tentang pengungkapan sosial perusahaan (CSD) di negara berkembang semakin banyak bermunculan, namun jumlah negara yang diteliti masih terbatas. Berdasarkan analisis konten, terdapat 11 negara berkembang - sebagian besar berada di wilayah Asia - yang telah diteliti secara empiris. Apabila dibandingkan dengan negara maju, negara berkembang menunjukkan faktor yang lebih beragam dalam memengaruhi CSD yang dihasilkan oleh perusahaan. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap CSD di kesebelas negara tersebut ditinjau dari sudut pandang teori legitimasi dan teori *stakeholder*.

Teori Legitimasi

Faktor yang berpengaruh terhadap CSD di negara berkembang berdasarkan sisi legitimasi adalah sama dengan yang ditemukan di negara maju. Salah satunya adalah ukuran perusahaan. Faktor ukuran perusahaan ditemukan berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan di Bangladesh (Muttakin & Khan, 2014), Tiongkok (Liu & Anbumozhi, 2009; Lu & Abeysekera, 2014), India (Kansal, Joshi, & Batra, 2014; Nurhayati *et al.*, 2016), Malaysia (Ghazali, 2007), Thailand (Branco & Rodrigues, 2006), Indonesia (Gunawan, 2007; Siregar & Bachtiar, 2010), Vietnam (Nguyen, Tran, Nguyen, & Le, 2017), Brazil (Goncalves, R.S., de Medeiros, O.R., Weffort, E.F.J., & Niyama, J.K., 2014) dan Mauritius (Mahadeo, Oogarah-Hanuman, & Soobaroyen, 2011).

Sama halnya dengan negara maju, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat CSD yang dihasilkan. Perusahaan dengan ukuran besar menarik perhatian publik sehingga mereka memberikan upaya lebih besar dalam menghasilkan CSD agar keberadaan mereka dapat terus diterima oleh masyarakat (Lu & Abeysekera, 2014; Nguyen *et al.*, 2017). Perusahaan besar juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang memiliki banyak cabang (Branco & Rodrigues, 2006). Dengan jumlah cabang yang banyak di tempat yang berbeda, perusahaan harus memastikan bahwa *stakeholder* di masing-masing wilayah cabang mendukung aktivitas mereka. Sementara, Siregar & Bachtiar (2010) berpendapat bahwa

semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin banyak pula sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut untuk menghasilkan CSD.

Faktor berikutnya yang ditemukan di negara berkembang adalah jenis industri di mana perusahaan beroperasi. Akan tetapi, faktor ini menghasilkan pengaruh yang berbeda-beda dalam menghasilkan CSD. Jenis industri memiliki pengaruh positif terhadap CSD di Bangladesh (Muttakin & Khan, 2014), India (Kansal *et al.*, 2014), Thailand (Ratanajongkol, Davey, & Low, 2006), dan Nigeria (Kalu, Buang, & Aliagha, 2016). Sementara, penelitian di Mauritius (Mahadeo *et al.*, 2011) menunjukkan bahwa pengaruh positif jenis industri terhadap CSD hanya ditunjukkan oleh jenis industri perbankan dan industri lain yang berhubungan langsung dengan lingkungan. Sementara, penelitian di Nigeria menunjukkan bahwa perusahaan yang beroperasi pada sektor industri dengan emisi karbon tinggi menghasilkan CSD yang lebih tinggi sebagai bentuk tanggung jawab mereka (Kalu *et al.*, 2016).

Jenis industri berpengaruh pula pada penekanan konten CSD yang dihasilkan oleh perusahaan. Ratanajongkol *et al.* (2006) memberikan contoh perusahaan di sektor industri jasa lebih banyak mengungkapkan aspek sosial dalam tema sumber daya manusia dan masyarakat. Sementara, perusahaan di sektor industri manufaktur lebih menekankan pada aspek lingkungan. Lu & Abeysekera (2014) mengungkapkan bahwa perusahaan yang bergerak di sektor *high-profile* menghasilkan tingkat CSD yang lebih tinggi sebagai strategi untuk memenuhi ekspektasi publik.

Beragam jenis tekanan seperti tekanan ekonomi, publik, dan institusional juga berpengaruh pada CSD yang dihasilkan di negara-negara berkembang. Tekanan ekonomi tampak kuat memengaruhi industri dengan emisi karbon tinggi di Nigeria dalam menghasilkan CSD (Kalu *et al.*, 2016). Perusahaan dengan emisi karbon tinggi berpotensi dikenakan pajak dan biaya tambahan lain yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membuktikan upayanya dalam mengurangi emisi karbon melalui CSD agar pajak yang dikenakan terhadap mereka menjadi berkurang. Selain itu, pemuatan informasi sosial dan lingkungan pada CSD berfungsi untuk menarik investor dan mempertahankan aliran modal di masa depan.

Tekanan institusional tampak pada praktik CSD di Afrika Selatan. Dawkins & Ngunjiri (2008) mengungkapkan bahwa operasional perusahaan di Afrika Selatan dipengaruhi oleh tekanan untuk menghormati preferensi *stakeholder* spesifik di wilayah tersebut. Sementara, perusahaan di Thailand menghadapi tekanan publik yang semakin besar untuk memublikasikan kinerja sosial dan lingkungan mereka (Ratanajongkol *et al.*, 2006).

Salah satu faktor unik yang ditemukan pada praktik CSD di negara berkembang adalah pemberian penghargaan bagi perusahaan dengan kinerja sosial dan lingkungan yang baik. Hal ini ditemukan dalam penelitian di Malaysia (Haniffa & Cooke, 2005) dan negara-negara kawasan ASEAN lainnya (Arena, Liong, & Vourvachis, 2018). Pemberian penghargaan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan secara sukarela karena sejalan dengan strategi legitimasi. Perusahaan yang memperoleh penghargaan akan memiliki reputasi baik di hadapan para *stakeholder*. Dengan demikian, perusahaan berkesempatan mempertahankan dukungan yang telah diperoleh untuk jangka waktu yang lebih lama.

Teori Stakeholder

Selain teori legitimasi, faktor-faktor yang memengaruhi CSD di negara berkembang juga dapat dianalisis dengan menggunakan teori *stakeholder*. Orientasi terhadap pemenuhan kebutuhan *stakeholder* ditunjukkan melalui penelitian di Thailand (Wuttichindanon, 2017; Ratanajongkol, Davey, & Low, 2006), Tiongkok (Liu & Anbumozhi, 2009; Lu & Abeysekera, 2014), India (Kansal, Joshi & Batra, 2014), Afrika Selatan (Dawkins & Ngunjiri, 2008), Malaysia (Haniffa & Cooke, 2005; Ghazali, 2007; Ahmad & Sulaiman, 2004), Brazil (Crisostomo, Freire, & Parente, 2014), Indonesia (Gunawan, 2007; Siregar & Bachtiar, 2010), dan Mauritius (Mahadeo, Oogarah-Hanuman, & Soobaroyen, 2011).

Wuttichindanon (2017) menjelaskan bahwa *stakeholder* secara keseluruhan berpengaruh terhadap praktik CSD oleh perusahaan di Thailand. Lebih lanjut, motif tanggung jawab kepada *stakeholder* lebih dominan dibandingkan dengan motif ekonomi (kondisi finansial) dalam mendorong perusahaan untuk

menghasilkan tingkat CSD yang lebih tinggi. Perusahaan di Thailand memegang nilai bahwa mereka harus bersifat akuntabel di hadapan masyarakat dan *stakeholder* lainnya. Dengan demikian, perusahaan harus mengungkapkan kinerja lingkungan dan sosial terlepas dari kondisi finansial yang dihadapinya.

Orientasi terhadap *stakeholder* masyarakat juga ditunjukkan oleh perusahaan di Indonesia. Gunawan (2007) menjelaskan bahwa pihak yang dipandang paling penting oleh perusahaan sebagai tujuan CSD adalah masyarakat. Hal ini berimplikasi pada prioritas konten publikasi CSD yaitu keamanan produk karena konten tersebutlah yang paling memengaruhi masyarakat. Sementara, perusahaan di India (Kansal *et al.*, 2014) mengeluarkan CSD untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.

Selain tanggung jawab terhadap masyarakat, perusahaan juga memiliki tanggung jawab kepada *stakeholder* lain yaitu pemerintah. Liu & Anbumozhi (2009) menjelaskan bahwa perusahaan di Tiongkok mengeluarkan CSD sebagai respon atas perhatian pemerintah dan pemegang saham. Begitu pula dengan Afrika Selatan di mana peraturan pemerintah mendorong perusahaan untuk mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungan kepada *stakeholder*. Peraturan ini bahkan menyebabkan perusahaan di Afrika Selatan mengeluarkan CSD lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan di negara maju (Dawkins & Ngujiri, 2008).

Di samping menjadi regulator, peran pemerintah sebagai *stakeholder* perusahaan juga dapat ditinjau dari sisi kepemilikan perusahaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perusahaan milik negara di Thailand (Wuttichindanon, 2017) dan Malaysia (Ghazali, 2007). Perusahaan milik negara di Thailand umumnya menerbitkan CSD ke dalam laporan tersendiri dan tidak bergabung dengan laporan tahunan. Sementara, perusahaan milik negara di Malaysia memiliki tingkat CSD yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan swasta. Hal ini dilatarbelakangi oleh gagasan bahwa perusahaan milik negara secara tidak langsung juga dimiliki masyarakat umum. Dengan demikian, perusahaan milik negara memperoleh sorotan yang lebih tinggi dari masyarakat terkait aktivitas sosial dan pelaporannya.

Stakeholder berikutnya adalah pihak internal perusahaan terutama individu yang menempati posisi manajerial. Haniffa & Cooke (2005) menemukan bahwa direktur eksekutif dan CEO berpengaruh terhadap CSD yang dilakukan oleh perusahaan di Malaysia. Direktur eksekutif dan CEO memandang bahwa CSD adalah strategi untuk melegitimasi perusahaan. Selain itu, direktur berkebangsaan Malaysia turut serta merepresentasikan budaya setempat dengan membawa nilai-nilai budaya dalam praktik CSD. Berbeda halnya dengan anak perusahaan multinasional di Bangladesh yang mengeluarkan CSD untuk mencari legitimasi internal dari induk perusahaan (Momin & Parker, 2013). Dalam hal ini, induk perusahaan merupakan *stakeholder* internal yang membutuhkan informasi tentang bagaimana anak perusahaan melakukan kinerja sosial dan lingkungan di negara lain. Apabila anak perusahaan terbukti memiliki kinerja sosial dan lingkungan yang baik, maka induk perusahaan akan mendorong anak perusahaan untuk terus beroperasi di negara tersebut.

Keunikan karakter *stakeholder* di negara berkembang, khususnya di wilayah Asia, adalah hubungannya dengan budaya setempat. Haniffa & Cooke (2005) mengungkapkan bahwa budaya Malaysia seperti diskriminasi positif pada kesempatan bisnis berdasarkan etnis berpengaruh pada praktik CSD perusahaan. Diskriminasi positif mengunggulkan warga beretnis Melayu (Malay) sehingga praktik CSD perusahaan pun turut membawa nilai budaya Melayu.

Demikian halnya yang terjadi di Bangladesh. Hasil penelitian Momin & Parker (2013) menyebutkan bahwa peraturan pemerintah secara formal tidak terlalu berpengaruh terhadap CSD yang dilakukan oleh anak perusahaan multinasional di Bangladesh. Sebaliknya, norma informal berdasarkan nilai-nilai Islam adalah peraturan yang lebih berpengaruh terhadap CSD perusahaan. Minimnya penegakan peraturan tertulis dan tumpuan pada nilai yang bersifat *tacit* menjadikan anak perusahaan multinasional di Bangladesh lebih berhati-hati dalam mengungkapkan kinerja sosial dan lingkungannya. Penelitian-penelitian di atas menunjukkan bahwa budaya turut berpengaruh dalam menentukan karakteristik *stakeholder* di suatu negara (Orij, 2010).

Faktor Lain yang Menggunakan Non-Specific Theory

Selain di negara maju, beberapa faktor di negara berkembang juga tidak dapat dijelaskan dengan satu teori induk. Faktor yang pertama adalah profitabilitas. Profitabilitas ditemukan memiliki hubungan positif dengan tingkat CSD pada negara Vietnam (Nguyen *et al.*, 2017), Bangladesh (Muttakin & Khan, 2014), Mesir (Hussainey, Elzayed & Razik, 2011) Nigeria (AdeizaFarouk & Hassan, 2013) serta Tiongkok (Lu & Abeysekera, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang baik, akan semakin meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Baik di negara maju maupun negara berkembang, perusahaan dengan kinerja keuangan yang lebih baik cenderung lebih bersedia untuk mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan operasi perusahaan (Nguyen *et al.*, 2017).

Faktor berikutnya adalah *leverage* atau tingkat hutang. Jika di negara maju hubungan *leverage* dengan CSD memiliki hubungan positif dan negatif, hal tersebut juga terjadi di negara berkembang. Hasil penelitian pada negara Mauritius (Mahadeo *et al.*, 2011) dan Nigeria (AdeizaFarouk & Hassan, 2013) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif pada CSD. Sementara hasil penelitian di negara India (Kansal *et al.*, 2014) dan Vietnam (Nguyen *et al.*, 2017) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh negatif pada CSD. Pengaruh positif disebabkan oleh pandangan bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memperoleh pengawasan sosial yang tinggi karena publik cenderung menaruh perhatian pada perusahaan yang memiliki tingkat hutang yang tinggi. Sementara, hubungan negatif antara *leverage* dengan CSD dikarenakan perusahaan dengan tingkat hutang yang tinggi tentu saja mengalami permasalahan keuangan dan solvabilitas, sehingga berdasarkan analisis biaya dan manfaat maka perusahaan akan kesulitan untuk memberikan perhatian terkait isu sosial dan lingkungan (Nguyen *et al.*, 2017).

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang memengaruhi praktik pengungkapan kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (CSD) di negara maju dan berkembang sesuai perspektif teori legitimasi dan teori *stakeholder*. Berdasarkan teori legitimasi, faktor penentu CSD seperti ukuran perusahaan, jenis industri, dan tekanan dari pihak lain (media, pemerintah, dan publik) ditemukan berpengaruh positif dalam praktik CSD baik di negara maju maupun berkembang.

Meskipun secara garis besar memiliki kesamaan, namun terdapat faktor unik yang membedakan praktik CSD di negara berkembang dari negara maju. Strategi perusahaan di negara berkembang untuk memperoleh legitimasi publik adalah dengan upaya memenangkan sejumlah penghargaan atas kinerja sosial dan lingkungan perusahaan (Haniffa & Cooke, 2005; Arena, Liang, & Vourvachis, 2018). Dengan memenangkan penghargaan, kesempatan perusahaan untuk mempertahankan dukungan publik menjadi semakin besar.

Saat ditinjau berdasarkan teori *stakeholder*, faktor yang memengaruhi CSD di negara maju dan negara berkembang semakin menunjukkan ciri khas masing-masing. Pada negara maju, *stakeholder* yang tampak menonjol adalah pemegang saham. Hal ini dibuktikan melalui penelitian di Inggris (Brammer & Pavelin, 2006) dan Turki (Kilic *et al.*, 2015) yang menunjukkan bahwa ketersebaran kepemilikan saham meningkatkan jumlah *stakeholder* dan ekspektasi terhadap perusahaan. CSD digunakan untuk menyeimbangkan ekspektasi yang semakin meluas sekaligus mengurangi asimetri informasi terhadap kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Faktor lainnya adalah kepemilikan saham oleh pemerintah yang menunjukkan hasil yang serupa dengan di negara berkembang yaitu tingginya tingkat CSD yang dikeluarkan oleh perusahaan milik pemerintah.

Faktor *stakeholder* yang memengaruhi CSD di negara berkembang lebih beragam. *Stakeholder* yang diutamakan oleh perusahaan di negara berkembang adalah masyarakat, pemerintah, dan pihak internal perusahaan. Pemilihan ketiga pihak tersebut sebagai *stakeholder* prioritas tidak terlepas dari nilai, norma, budaya, dan peraturan di masing-masing negara (Wuttichindanon, 2017; Haniffa & Cooke, 2005; Momin & Parker, 2013). Karakteristik *stakeholder* yang berbeda menjadi tantangan bagi perusahaan dalam mengungkap kinerja sosial dan lingkungan di negara tempat mereka beroperasi.

Selain faktor-faktor di atas, terdapat faktor yang dianalisis dengan menggunakan lebih dari satu teori (*non-specific theory*). Faktor-faktor tersebut adalah profitabilitas dan tingkat hutang (*leverage*) yang ditemukan baik pada perusahaan di negara maju dan negara berkembang. Secara keseluruhan, teori legitimasi dan teori *stakeholders* saling terkait dalam hal analisis faktor yang memengaruhi CSD. Deegan (2002) menyatakan bahwa kesamaan karakteristik kedua teori tersebut yaitu dipengaruhi dan memengaruhi kelompok lain dalam masyarakat yang menjadikan keduanya memiliki keterhubungan.

Keterbatasan pertama dari penelitian ini adalah jumlah artikel penelitian yang dianalisis. Keterbatasan kedua adalah jumlah negara maju dan negara berkembang yang menjadi objek studi. Penelitian berikutnya diharapkan mampu memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial di negara maju dan negara berkembang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adeiza Farouk, M. & Hassan, S.U. (2013). Determinants of Corporate Social Responsibilities in the Nigerian listed Deposit Money Banks. *International Journal of Economics, Business and Finance*, **1**(10): 342-351
- Ahmad, N.N.N & Sulaiman, M. (2004). Environmental Disclosures in Malaysian Annual Reports: A Legitimacy Theory Perspective. *IJCM*, **14**(1): 44-58.
- Anas, A., Rashid, H.M.A & Annuar, H.A. (2015). The Effect of Award in CSR Disclosures in Annual Reports of Malaysian PLCs. *Social Responsibility Journal*, **11**(4): 831-852.
- Andrikopoulos, A. & Krikliani, N. (2012). Environmental Disclosure and Financial Characteristics of the Firm: The Case of Denmark. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management: Published Online in Wiley Online Library*.
- Arena, C., Liong, R. & Vourvachis, P. (2018). Carrot or Stick: CSR Disclosures by Southeast Asian Companies. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, **9**(4): 422-454.
- Basalamah, A. S. & Jermias, J. (2005). Social and Environmental Reporting and Auditing in Indonesia: Maintaining Organizational Legitimacy? *Gadjah Mada International Journal of Business*, **7**(1): 109-127.
- Blowfield, M. and Frynas, J.G. (2005). Setting new agendas: critical perspectives on corporate social responsibility in the developing world. *International Affairs*, **81**, pp. 499-513.
- Boesso, G. & Kumar, K. (2007). Drivers of Corporate Voluntary Disclosure: A Framework and Empirical Evidence from Italy and the United States. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, **20**(2): 269-296.
- Bordens, K.S. & Abbott, B.B. (2005). *Research design and methods: a process approach, eighth edition*. McGraw-Hill, New York, USA.
- Brammer, S. & Pavelin, S. (2006). Voluntary Environmental Disclosures by Large UK Companies. *Journal of Business Finance & Accounting*, **33**(7&8): 1168-1188.
- Branco, M.C. & Rodrigues, L.L. (2006). Communication of Corporate Social Responsibility by Portuguese Banks: A Legitimacy Theory Perspective. *Corporate Communications: An International Journal*, **11**(3): 232-248.
- Cho, C.H. & Patten, D.M. (2007). The Role of Environmental Disclosure as Tools of Legitimacy: A Research Note. *Accounting, Organizations and Society*, **32**: 639-647.
- Clarke, J. & Gibson-Sweet, M. (1999). The Use of Corporate Social Disclosures in The Management of Reputation and Legitimacy: A Cross Sectoral Analysis of UK Top 100 Companies. *Business Ethics: A European Review*, **8**(1): 5-13.
- Cornier, D., Magnan, M. & Velthoven, B.V. (2005). Environmental Disclosure Quality in Large German Companies: Economic Incentives, Public Pressures or Institutional Conditions? *European Accounting Review*, **14**(1): 3-39.

- Cowen, S.S., Ferreri, L.B. & Parker, L.D. (1987). The Impact of Corporate Characteristics on Social Responsibility Disclosure: A Typology and Frequency-Based Analysis. *Accounting, Organizations and Society*, **12** (2): 111-22.
- Crisostomo, L.V., Freire, F.D.Z. & Parente, P.H.N. (2014). An Analysis of Corporate Social Responsibility in Brazil: Growth, Firm Size, Sector and Internal Stakeholders Involved in Policy Definition. *Pensamiento & Gestion*, **37**: 125-149.
- Dawkins, C. & Ngunjiri, F.W. (2008). Corporate social responsibility reporting in south africa: A Descriptive and Comparative Analysis. *Journal of Business Communication*, **45**(3): 286-307
- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosure – a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, **15**(3): 282-311
- Deegan, C. & Unerman, J. (2006). *Financial Accounting Theory European Edition*. Berkshire, United Kingdom: McGraw-Hill Education (UK) Limited.
- Dierkes, M. & Antal, A. (1985). The Usefulness and Use of Social Reporting Information, *Accounting Organizations and Society*, **10**(1): 29-34.
- Freeman, R.E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman, Boston, United States.
- Friedman, M. (1962). *Capitalism and Freedom*. Chicago: University of Chicago Press.
- Gao, S.S., Heravi, S. & Xiao, J.Z. (2005). Short Communication Determinants of Corporate Social and Environmental Reporting in Hong Kong: A Research Note. *Accounting Forum*, **29**: 233-242.
- Gaffikin, M. (2008). *Accounting Theory: Research, Regulation and Accounting Practice*. Pearson Education. Australia.
- Garcia-Ayuso, M. & Larrinaga, C. (2003). Environmental Disclosure in Spain: Corporate Characteristics and Media Exposure. *Spanish Journal of Finance and Accounting*, **32**(115): 185-214.
- Ghazali, N.A.M. (2007). Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosure: Some Malaysian Evidence. *Corporate Governance*, **7**(3): 251-266.
- Goncalves, R.S., deMedeiros, O.R., Weffort, E.F.J., & Niyama, J.K. (2014). A social disclosure index for assessing social programs in brazilian listed firms. *Accounting in Latin America*, **14**: 75-103
- Gray, R., Owen, D. and Adams, C. (1996). *Accounting and Accountability*. Pearson Education, Harlow.
- Gunawan, J. (2007). Corporate Social Disclosures by Indonesian Listed Companies: A Pilot Study. *Social Responsibility Journal*, **3**(3): 26 - 34
- Hackston, D. & Milne, M.J. (1996). Some Determinants of Social and Environmental Disclosures in New Zealand Companies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, **8**(1): 77-108.
- Haniffa, R.M. & Cooke, T.E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, **24**: 391–430
- Harvey, F. & Hirsch, A. (2013). *Shell Acquitted of Nigeria Pollution Charges* dalam <https://www.theguardian.com/environment/2013/jan/30/shell-acquitted-nigeria-pollution-charges> (diakses pada 27 November 2018).
- Hussainey, K., Elsayed, M. & Razik, M.A. (2011). Factors Affecting Corporate Social Responsibility Disclosure in Egypt. Paper accepted for the publication at Corporate Ownership and Control.
- Jamali, D. and Neville, B. (2011). Convergence versus divergence of CSR in developing countries: an embedded multilayered institutional lens. *Journal of Business Ethics*, **102**, pp. 599–621.
- Kalu, J.U., Buang, A. & Aliagha, G.U. (2016). Determinants of Carbon Emission Disclosure and Reduction in Corporate Real Estate Companies in Nigeria. *Journal of Environment and Earth Science*, **6**(2): 87-94.
- Kansal, M., Joshi, M., & Batra, G.S. (2014). Determinants of corporate social responsibility disclosures: Evidence from India. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* (2014).
- Katircioglu, S.T. (2014). International Tourism, Energy Consumption and Environmental Pollution: The Case of Turkey. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, **36**: 180-187.
- Kilic, M., Kuzey, C. & Uyar, A. (2015). The Impact of Ownership and Board Structure on Corporate Social Responsibility (CSR) Reporting in the Turkish Banking Industry. *Corporate Governance*, **15**(3): 357-374.

- Lindblom, C.K. (1993). The implications of organizational legitimacy for corporate social performance and disclosure, paper presented at the Critical Perspective on Accounting Conference, New York, NY.
- Liu, X. & Anbumozhi, V. (2009). Determinant factors of corporate environmental information disclosure: an empirical study of Chinese listed companies. *Journal of Cleaner Production*, **17**: 593-600.
- Lu, Y. & Abeysekera, I. (2014). Stakeholders' power, corporate characteristics, and social and environmental disclosure: evidence from China. *Journal of Cleaner Production*, **64**: 426-436.
- Mahadeo, J.D., Oogarah-Hanuman, V. & Soobaroyen, T. (2011). A Longitudinal Study of Corporate Social Disclosures in a Developing Economy. *Journal of Business Ethics*, **104**:545-558
- Milne, M.J. & Patten, D. (2002). Securing Organizational Legitimacy: An Experimental Decision Case Examining the Impact of Environmental Disclosures. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, **15**(3): 372-405.
- Momin, M.A. & Parker, L.D. (2013). Motivations for corporate social responsibility reporting by MNC subsidiaries in an emerging country: The case of Bangladesh. *The British Accounting Review*, **45**: 215-228.
- Muttakin, M.B. & Khan, A. (2014). Determinants of corporate social disclosure: Empirical evidence from Bangladesh. *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting*, **30**: 168-175
- Naser, K., Al-Hussaini, A., Al-Kwari, D. & Nuseibeh, R. (2006). Determinants of Corporate Social Disclosure in Developing Countries: The Case of Qatar. *Advances in International Accounting*, **19**: 1-23.
- Nguyen, L.S., Tran, M.D., Nguyen, T.X.H. & Le, Q.H. (2017). Factors Affecting Disclosure Levels of Environmental Accounting Information: The Case of Vietnam. *Accounting and Finance Research*, **6**(4): 255-264.
- Nurhayati, R., Taylor, G., Rusmin, R., Tower, G. & Chatterjee, B. (2016). Factors Determining Social and Environmental Reporting by Indian Textile and Apparel Firms: A Test of Legitimacy Theory. *Social Responsibility Journal*, **12**(1): 167-189.
- Orij, R. (2010). Corporate social disclosures in the context of national cultures and stakeholder theory. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, **23**(7): 868 - 889
- Ratanajongkol, S., Davey H., & Low, M. (2006). Corporate social reporting in Thailand: The news is all good and increasing. *Qualitative Research in Accounting & Management*, **3**(1): 67-83.
- Roberts, R.W. (1992). Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure: Application of Stakeholder Theory. *Accounting, Organizations, and Society*, **17**(6): 595-612
- Ryan, C., Dunstan, K. & Brown, J. (2002). The Value of Public Sector Annual Reports and Annual Reporting Awards in Organisational Legitimacy. *Accounting, Accountability & Performance*, **8**(1): 61-76.
- Siregar, S.V. & Bachtiar, Y. (2010). Corporate Social Reporting: Empirical Evidence from Indonesia Stock Exchange. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Management*, **3**(3): 241-252.
- Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P. & Collin, S.O. (2009). What Explains the Extent and Content of Social and Environmental Disclosures on Corporate Websites: A Study of Social and Environmental Reporting in Swedish Listed Corporations. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, **16**: 352-364.
- Ullmann, A.A. (1985). Data in search of a theory: a critical examination of the relationships among social disclosure, and economic performance of US firms. *Academy of Management Review*, **10** (3): 540-57.
- Van der Laan Smith, J., Adhikari, A., & Tondkar, R.H. (2005). Exploring differences in social disclosures internationally: A stakeholder perspective. *Journal of Accounting and Public Policy*, **24**: 123-151
- World Bank. (2018). *World Bank Country Classifications 2018*. <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519> (diakses pada 21 November 2018)

Wuttichindanon, S. (2017). Corporate social responsibility disclosed choices of report and its determinants: Empirical evidence from firms listed on the Stock Exchange of Thailand. *Kasetsart Journal of Social Science*, 38: 156-162.

LAMPIRAN:

Rangkuman Hasil Penelitian Empiris Menggunakan Analisis Konten

Keterangan:

(+): berpengaruh positif; (-): berpengaruh negatif; (o): tidak berpengaruh

No	Nama Penulis	Tahun	Teori	Negara	Hasil
1.	Roberts, R.W	1992	ST	AS	Kekuatan stakeholder (+); tekanan kreditur (+); postur strategis (+); ROE (+); persebaran kepemilikan (o)
2.	Hackston, D. & Milne, M. J.	1996	LT	Selandia Baru	Ukuran perusahaan (+); Jenis industri (+); Profitabilitas (o)
3.	Clarke, J & Gibson-Sweet, M.	1999	LT	Inggris	Perusahaan <i>high profile</i> (+); Jenis industri (+)
4.	Garcia-Ayuso, M. & Larrinaga, C.	2003	LT	Spanyol	Ukuran perusahaan (+); Risiko terkait alam (+); Jenis industri (+); Tekanan media (+)
5.	Ahmad, N. N. N& Sulaiman, M.	2004	LT	Malaysia	Peraturan pemerintah (+); orientasi terhadap <i>stakeholder</i> (+)
6.	Gao, S.S., Heravi, S. & Xiao, J. Z.	2005	LT	Hong Kong	Ukuran perusahaan (+); Jenis industri (+); Jenis industri akan memengaruhi proporsional CSD dalam laporan tahunan dan konten informasi yang disajikan
7.	Haniffa, R.M., & Cooke, T.E	2005	LT	Malaysia	Penghargaan (+); budaya (+); peraturan pemerintah (+); direktur dan CEO (+); pemegang saham asing (+)
8.	Van der Laan Smith, J., Adhikari, A., & Tondkar, R.H.	2005	ST	Denmark, Norwegia, AS	Ukuran perusahaan (+); jarak kekuasaan (-); perhatian publik terhadap isu sosial (+)
9.	Branco, M. C. & Rodrigues, L. L.	2006	LT	Thailand	Ukuran perusahaan (+); Perusahaan publik (+)
10.	Brammer, S. & Pavelin, S.	2006	LT & ST	Inggris	Jenis industri (+); Kinerja lingkungan (o); Ukuran perusahaan (+); Tekanan media (o); Kepemilikan saham tersebar (+); Profitabilitas (o); <i>Leverage</i> (+); Direktur Non Eksekutif (o)
11.	Naser, K., Al-Hussaini, A., Al-Kwari-D., & Nuseibeh, R.	2006	AT, PET, LT & ST	Qatar	Ukuran Perusahaan (+); <i>Leverage</i> (+); Risiko perusahaan (+); Kepemilikan institusional (o); Ketersebaran pemegang saham (o); Kepemilikan

					pemerintah (o)
12.	Ratanajongkol, S., Davey, H., & Low, M.	2006	ST, LT	Thailand	Ukuran perusahaan (o); sektor industri (+); tekanan publik (+); orientasi terhadap <i>stakeholder</i> (+)
13.	Cho, C. H. & Patten, D. M.	2007	LT	Amerika Serikat	Jenis industri (+); Kinerja lingkungan (-)
14.	Ghazali, N. A. M.	2007	LT, ST & IT	Malaysia	Konsentrasi kepemilikan (o); Kepemilikan manajerial (-); Kepemilikan publik (+); Ukuran perusahaan (+); Profitabilitas (o); Tingkat persaingan (o)
15.	Boesso, G. & Kumar, K.	2007	LT, ST & AT	Amerika Serikat & Italia	Ukuran perusahaan (+); Jenis Industri (+); Kebutuhan informasi investor (o); Struktur tata kelola perusahaan (o); Perhatian <i>stakeholder</i> (+); Manajemen aset tidak berwujud (o)
16.	Gunawan, J.	2007	LT, ST	Indonesia	Orientasi kepada <i>stakeholder</i> (+); pemegang saham (+); ukuran perusahaan (+); keinginan meningkatkan reputasi (+)
17.	Dawkins, C., & Ngunjiri, F.W.	2008	LT, IMT	Afrika Selatan	Tekanan institusional (+); peraturan pemerintah (+); orientasi kepada <i>stakeholder</i> (+)
18.	Tagesson, T., Blank, V., Broberg, P. & Collin, S.O.	2009	LT, ST & PAT	Swedia	Ukuran perusahaan (+); Jenis industri (+); Profitabilitas (+); Kepemilikan pemerintah (+); Konsentrasi kepemilikan saham (o)
19.	Liu, X., & Anbumozhi, V.	2009	ST	Tiongkok	Ukuran perusahaan (+); jenis industri dan sensitivitas lingkungan (+); peraturan pemerintah (+); tekanan pemegang saham (+); tekanan kreditur (+)
20.	Siregar, S. V. & Bachtiar, H.	2010	LT & ST	Indonesia	Ukuran dewan (+); Ukuran perusahaan (+); Kepemilikan asing (o); Profitabilitas (o); <i>Leverage</i> (o)
21.	Orij, R.	2010	ST	Australia, Austria, AS, Belgia, Kanada, Denmark, Finlandia, Perancis, Jerman, Yunani, Hong Kong, Irlandia, Italia, Jepang,	Tingkat kerahasiaan bangsa (+); maskulinitas (+); tipe budaya umum (+); orientasi jangka panjang (o)

				Belanda, Norwegia, Portugal, Spanyol, Singapura, Swedia, Swiss, Inggris	
22.	Cormier, D., Magnan, M. & Velthoven, B. V.	2011	<i>Economic Based Theory, LT & IT</i>	Jerman	Biaya informasi (o); Kinerja perusahaan (o); Tekanan publik (+); Jenis industri (+); Tindakan imitasi (+); Kelanjutan atas pengungkapan sebelumnya (+)
23.	Mahadeo, J.D., Oogarah- Hanuman, V., & Soobaroyen, T.	2011	LT	Mauritius	Kesadaran <i>stakeholder</i> (+); agenda politik (+); ukuran perusahaan (+); <i>leverage</i> (+); jenis industri (+); keinginan legitimasi (o)
24.	Hussainey, K., Elsayed, M. & Razik, M.A.	2011	LT	Mesir	Ukuran perusahaan (o); Profitabilitas (+); Likuiditas (o); <i>Gearing</i> (o); Struktur Kepemilikan (o); Jenis Audit (-)
25.	Andrikopoulos, A. & Kriklani, N.	2012	LT & ST	Denmark	Ukuran perusahaan (+); <i>Leverage</i> (-); Profitabilitas (+); Kapitalisasi pasar (+)
26.	Momin, M.A., & Parker, L.D	2013	LT, NIT	Bangladesh	Keinginan mempertahankan reputasi (+); <i>stakeholder</i> internal (+); budaya dan norma informal (+)
27.	AdeizaFarouk, M. & Hassan, S.U.	2013	LT, ST	Nigeria	Profitabilitas (+); Ukuran Perusahaan (+); Dividen (+); Kepemilikan Institusional (+); <i>Leverage</i> (+); Pertumbuhan perusahaan (+)
28.	Crisostomo, V. L., Freire, F. D. S., & Parente, P. H. N.	2014	LT & ST	Brazil	Ukuran perusahaan (o); <i>Stakeholder</i> internal (+)
29.	Muttakin, M.B.& Khan, A.	2014	LT	Bangladesh	Kepemilikan keluarga (o); ukuran perusahaan (+); sektor industri (+); profitabilitas (+); usia perusahaan (+)
30.	Lu, Y., & Abeysekera, I.	2014	LT dan ST	Tiongkok	Ukuran perusahaan (+); sektor industri (+); profitabilitas (+) tekanan pemegang saham (+); tekanan kreditur (+); peraturan pemerintah (+)
31.	Kansal, M., Joshi, M., & Batra, G.S.	2014	LT dan ST	India	Ukuran perusahaan (+); <i>leverage</i> (-); kinerja keuangan keseluruhan (+); usia perusahaan (+); sektor industri (+); kebutuhan informasi <i>stakeholder</i> (+)

32.	Goncalves, R.S., deMedeiros, O.R., Weffort, E.F.J., & Niyama, J.K.	2014	LT	Brazil	Ukuran perusahaan (+); sektor industri (+); internasionalisasi perusahaan (+); dana pra-aksesi (+)
33.	Kilic, M., Kuzey, C. & Uyar, A.	2015	LT & ST	Turki	Ukuran perusahaan (+); Ketersebaran kepemilikan saham (+); Independensi komposisi dewan (+); Dewan perempuan (+); Ukuran dewan (o)
34.	Kalu, J. U., Buang, A., & Aliagha, G. U.	2016	<i>Signal Theory</i> , LT, AT & ST	Nigeria	Tekanan ekonomi (+); Jenis industri (+); Keterlibatan <i>stakeholder</i> (+); Kepemilikan institusional (+)
35.	Nurhayati, R., Taylor, G., Rusmin, R., Tower, G., & Chatterjee, B.	2016	LT & ST	India	Ukuran perusahaan (+); <i>Branded product</i> (+); Independensi dewan (o); Konsentrasi kepemilikan (o)
36.	Nguyen, L. S., Tran, M. D., Nguyen, T. X. H. & Le, Q. H.	2017	LT, ST & <i>Legalization Theory</i>	Vietnam	Ukuran perusahaan (+); Profitabilitas (+); <i>Leverage</i> (-); Jangka waktu sebagai perusahaan publik (+); Menggunakan jasa Kantor Akuntan Publik bereputasi (+)
37.	Wuttichindanon, S	2017	ST	Thailand	Tanggung jawab kepada stakeholder (+); ukuran perusahaan (+); kepemilikan pemerintah (+)
38.	Arena, C., Liong, R., & Vourvachis, P.	2018	LT	<i>Association of South East Asian Nations (ASEAN)</i>	Pelaporan bersifat mandatori (+); Penghargaan terkait CSD (+)